



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.88>

Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2020

¹⁾Desrian Effendi, ²⁾Muhammad Yusrizal Efendi

^{1), 2)}Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji

Email: yusrizalefendi123@gmail.com

Abstract

Kesbangpol is one of the parties involved or responsible for supporting the implementation of the 2020 Riau Islands Governor election. The task of the Tanjungpinang City Kesbangpol is to assist the Mayor in administering Regional Government and implementing regional policies in the fields of National Unity, Domestic Politics and Community Empowerment. The study was to determine the evaluation of Community Knowledge Improvement Activities regarding the Implementation of the 2020 Governor Election. The researcher uses the concept of CIPP policy evaluation by Stufflebeam. This type of research is evaluative with a qualitative approach. The population of this research is the Kesbangpolpenmas Agency of Tanjungpinang City and 500 participants based on the attendance of participants in the activity to increase public knowledge about the 2020 Governor election. The sample technique used is purposive sampling. The data used are primary and secondary data, where the data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by qualitative analysis. The results of the research can be concluded that the first is related to participants in the Public Awareness Improvement activity regarding the Implementation of the 2020 gubernatorial election is still low. Suggestions should be that the time allocated for training is longer and divided by sub-districts will be more effective.

Keywords: Evaluation, Knowledge Improvement

Abstrak

Kesbangpol merupakan salah satu pihak yang terlibat atau bertanggung jawab atas mendukung pelaksanaan pemilihan Gubernur Kepri 2020. Adapun tugas dari Kesbangpol Kota Tanjungpinang adalah Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020. Peneliti menggunakan konsep evaluasi kebijakan CIPP oleh Stufflebeam. Jenis penelitian ini adalah evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah Badan Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang dan 500 orang peserta berdasarkan absensi peserta pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan Gubernur 2020. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dimana teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan yang pertama berkaitan dengan peserta pada kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2020 masih rendah. Saran sebaiknya waktu yang disediakan untuk pelatihan lebih lama dan dibagi perkecamatan akan lebih efektif.

Kata Kunci: Evaluasi, Peningkatan Pengetahuan



PENDAHULUAN

Reformasi telah menghasilkan pergantian dan pengisian kembali kepala daerah menjadi sangat demokratis, maksudnya kedaulatan ada ditangan rakyat atau rakyatlah yang menentukan siapa yang lebih tepat memimpin daerahnya. Satu diantara pergantian dan pengisian kembali kepala daerah adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub dan wagub) yang sebelumnya dipilih oleh DPRD provinsi, namun saat ini telah dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat dalam satu provinsi. Pilgub dan wagub yang dilakukan secara langsung diharapkan mampu mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat dan lebih mengetahui kondisi daerahnya karena pada umumnya mereka yang terpilih adalah mereka yang berasal dari daerah tersebut.

Kesbangpol merupakan salah satu pihak yang terlibat atau bertanggung jawab atas mendukung pelaksanaan pemilihan Gubernur Kepri 2020. Adapun tugas dari Kesbangpol Kota Tanjungpinang adalah Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian menurut Rohman (16:2016) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik satu diantara pemangku kebijakan di daerah yang sangat bersinggungan dengan proses pelaksanaan pemilu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kaitannya tentang pembinaan kepada masyarakat, ormas dan partai politik. Lembaga ini juga menjadi mitra kerja KPU dalam proses pembinaan kepada masyarakat tentang pendidikan pemilih, pendidikan politik dan demokrasi, pembinaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan partai politik.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang (Badan Kesbangpolpenmas) Kota Tanjungpinang dalam mendukung pelaksanaan Pilgub dan Wagub Kepulauan Riau Tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Ballroom Hotel CK Tanjungpinang. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Kepri pada masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dari siklus kebijakan publik. Evaluasi dilaksanakan setelah kebijakan tersebut di implementasikan. Namun sebenarnya, evaluasi bukanlah akhir dari kebijakan karena evaluasi akan memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan kebijakan selanjutnya. Menurut Abderson (Abdal:2015) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Stufflebeam (Wirawan:2011) menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif

terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model CIPP terdiri dari 4 jenis evaluasi (Wirawan:2011), yaitu Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation dan Product Evaluation.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah proses dalam memilih pemimpin yang akan menduduki lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif dan merupakan konsekuensi yang logis dalam sebuah Negara demokratis sebagai sebuah kontrol warga Negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut Fahmi (Harahap:2016) pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.

Pemangku Kepentingan dalam Pemilu

Dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu, tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, para pemangku kepentingan juga mempengaruhi kesuksesan tersebut. menurut Wall dkk (2006:221) para pemangku kepentingan adalah setiap individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki kepentingan atau 'saham' dalam kerja operasional LPP.

Kemudian Wall dkk membagi dua pemangku kepentingan yaitu pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan sekunder. Pemangku kepentingan utama adalah pihak-pihak yang mempengaruhi atau terpengaruh secara langsung oleh aktivitas, kebijakan, dan kinerja LPP.

Pemerintah Daerah dalam Pemilu

Pemerintah eksekutif yang diungkapkan oleh Wall dkk (2006:223) di atas merupakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah bagian keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan anggaran. LPP model pemerintahan maupun model kombinasi harus selalu berkoordinasi dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, oleh karena itu koordinasi menjadi sangat penting. Selain anggaran, LPP membutuhkan beberapa fasilitas dari pemerintah daerah, seperti transportasi, logistik, atau bantuan tenaga, audit secara reguler oleh lembaga audit Negara. LPP juga memerlukan bantuan tenaga kepolisian dan militer untuk pengamanan jalannya proses pemilu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada kajian ini adalah evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluatif dalam kajian ini digunakan karena penulis ingin melakukan evaluasi pada kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020. Didalam UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan pemerintah daerah bisa melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu. Lokasi kajian ini di Kota Tanjungpinang karena Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dan dari 7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, hanya Kota Tanjungpinang yang tidak melakukan pemilihan walikota dan wakil walikota.

Populasi kajian ini Badan Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang dan 500 orang peserta berdasarkan absensi peserta kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan Gubernur 2020. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020 yang terdiri dari tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan forum RT dan RW. Informan adalah para pihak di Badan Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang yang memegang tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Pilgub dan Wagub Kepulauan Riau Tahun 2020. Sedangkan sampling purposive yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti mempertimbangkan pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai objek penelitian. Informan dalam kajian ini adalah berjumlah 5 orang, yaitu: 2 (dua) orang di Badan Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang dan 3 orang peserta kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020.

Data penelitian ini adalah 1. data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti dilapangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mendukung pelaksanaan Pilgub dan Wagub Kepulauan Riau Tahun 2020 terutama kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020, baik melalui wawancara maupun observasi. 2. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui publikasi-publikasi yang telah ada serta hasil laporan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mendukung pelaksanaan Pilgub dan Wagub Kepulauan Riau Tahun 2020, dan data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung data primer. Dalam menghimpun data, maka digunakan teknik wawancara, dan observasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Miles dan Huberman (1992), menurut mereka terdapat tiga tahapan analisis data yang harus dilalui, agar data yang disajikan benar-benar memiliki kesahihan dan dapat dipercaya. Adapun tiga tahapan tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengevaluasi kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2020, maka peneliti menggunakan beberapa model evaluasi menurut (Wirawan:2011), yaitu Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation dan Product Evaluation. Model CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Context Evaluation / Evaluasi Konteks

Fokus utama dari evaluasi konteks adalah analisis kebutuhan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dibutuhkan?. Dalam konteks penyelenggaraan Pilgub dan Wagub Kepulauan Riau tahun 2020 apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mau datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan benar pada masa Pandemi COVID-19. Pihak-pihak terkait memberikan informasi tentang kebutuhan masyarakat Kota Tanjungpinang pada pelaksanaan Pilgub dan Wagub Kepulauan Riau Tahun 2020.

Input Evaluation / Evaluasi Masukan

Pada tahap evaluasi masukan akan memusatkan perhatian pada rencana dan strategi yang harus dilakukan. pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Badan Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pada pelaksanaan Pilgub dan WagubKepulauan Riau Tahun 2020.

Process Evaluation / Evaluasi Proses

Pada tahap ketiga ini pertanyaan utama adalah bagaimana kegiatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun2020 dilaksanakan.

Product Evaluation / Evaluasi Produk

Pada tahap terakhir adalah evaluasi produk, pertanyaan utamanya adalah apakah kegiatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020 sukses?

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai Bab penutup pada bagian terakhir penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menutup dengan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan mengenai Kegiatan Peningkatan Pengatahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2020 dan juga saran yang peneliti sampaikan untuk kegiatan selanjutnya mengenai Kegiatan Peningkatan Pengatahuan Masyarakat maka penulis dapat mengambil kesimpulan dimana kesimpulan ini bisa dilihat beberapa dari pendekatan menurut (Wirawan:2011) sebagai berikut : Context evaluation / Evaluasi Konteks, yaitu merujuk pada kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program. Namun pada kegiatan ini kenyataannya masyarakat membutuhkan sosialisasasi yang intens agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Walaupun figur berperan untuk mengajak masyarakat memilih. Input evaluation / Evaluasi Masukan, Evaluasi ini dianggap sebagai pemecahan masalah. Untuk para peserta sebaiknya orang yang melakukan golput atau yang enggan berpartisipasi di pemilihan-pemilihan sebelumnya. Process evaluation / Evaluasi Proses, Evaluasi proses merujuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program. Materi yang disampaikan masih belum tepat dengan apa yang diinginkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Product evaluation / Evaluasi Produk, Evaluasi produk membantu mendapatkan keputusan selanjutnya. Pada acara Peningakatan Pengatahuan Masyarakat Tentang Pemilihan Gubernur 2020 masih terdapat kekuranga, baik itu dari penyampaian materi oleh narasumber, waktu yang disediakan dan peserta yang mengikuti acara tersebut.

Saran

Terkait dengan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka berikut beberapa saran agar acara yang dibuat selanjutnya sesuai dengan tema yang diusung dan target peserta supaya tingkat partisipasi di Kota Tanjungpinang naik diantara lain : Untuk peserta yang diundang seharusnya orang-orang yang enggan untuk berpartisipasi politik atau golput dengan cara

mengundang melalui perangkat RT/RW dikarenakan mereka mempunyai data siapa saja warganya yang tidak melakukan pencoblosan pada hari pemilihan. Materi yang disampaikan oleh narasumber seharusnya mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat, bukan hanya tugas dari instansi narasumber berasal. Waktu yang disediakan sangatlah kurang, panitia seharusnya melaksanakan kegiatan ini dengan waktu yang panjang dan acara tersebut dibagi perkecamatan agar mereka lebih fokus dalam menerima materi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2020. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2020.
- Harahap, Rizki Rahman. 2016. Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014). Vol 3: No 2. Jom Fisip UNRI.
- Miles, MB dan AM, Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE: Beverly Hills.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, MH Fathur. Peran Strategis Pemangku Kebijakan Dalam Kesuksesan Pemilu di Daerah. Edisi 12 Oktober 2016. Suara KPU Jawa Timur: Jurnal Ide.
- Suardita, I Ketut. 2016. Diktat Ilmu Administrasi Negara. Universitas Udayana.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wall, Alan Dkk. 2006. Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA. International IDEA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

SK KPU Provinsi Kepri Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang Nomor 16 tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2020.

Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang Nomor 17 tahun 2020 tentang Tenaga Narasumber Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2020.

Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang Nomor 18 tahun 2020 tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2020.

SOP No. 270/01/4.5.03/2020 dengan nama Proses Kegiatan Peningkatan.